



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TER TINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penerapan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 875);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 875) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2021

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
ttd. **Kepala Biro Hukum**

BENNY RIYANTO



**Teguh**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1163

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2  
TAHUN 2017 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI  
KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Ruang Lingkup
- C. Pengertian
- D. Asas
- E. Pengorganisasian
- F. Sarana dan Prasarana
- G. Sumber Daya Manusia

BAB II KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

- A. Ruang Lingkup
- B. Klasifikasi Keamanan
- C. Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip

BAB III KLASIFIKASI AKSES ARSIP

BAB IV DAFTAR ARSIP BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN  
AKSES ARSIP DINAMIS

BAB V PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengubah paradigma Bangsa Indonesia terhadap informasi arsip dinamis yang semula tertutup untuk publik menjadi terbuka walaupun ada sebagian informasi dikecualikan atau tertutup. Undang-undang tersebut juga menjadi landasan penting terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Dengan demikian, setiap pencipta arsip diwajibkan untuk membuat dokumen tersebut.

Dokumen klasifikasi keamanan dan hak akses arsip digunakan sebagai dasar dalam memberikan layanan informasi publik secara cermat terhadap jenis-jenis informasi arsip sehingga dapat menjamin keamanan dan akuntabilitas informasinya. Oleh karena itu, penyusunan klasifikasi pengamanan dan akses arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendesak untuk dilaksanakan dan dibakukan.

Melalui Klasifikasi Pengamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, diharapkan layanan informasi arsip bagi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat terlaksana secara benar dan efektif tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan.

### B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencakup:

1. Klasifikasi Keamanan Arsip: memuat informasi biasa, terbatas, dan rahasia; dan

2. Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip: memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

### C. Pengertian

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama jangka waktu tertentu.
3. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya, dalam hal ini unit kerja Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
6. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
7. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan serta pengelompokannya.
8. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.

9. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
10. Kategori Arsip adalah kategori jenis arsip berdasarkan substantif dan fasilitatif sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
11. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
12. Biasa adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
13. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.
14. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
15. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
16. Pengguna Internal adalah pengguna arsip yang berasal dari lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
17. Pengguna Eksternal adalah pengguna arsip yang berasal dari luar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
18. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
19. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

#### D. Asas

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan yaitu sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan. Penetapan kebijakan dalam klasifikasi dan akses arsip dinamis di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta *standard operating procedure* atau prosedur operasional standar, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

#### E. Pengorganisasian

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Arsip yang tercipta di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, dan rahasia.
2. Ketiga klasifikasi tersebut berbeda dalam teknis pengamanannya. Semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya.
3. Ketiga klasifikasi tersebut berbeda dalam pengaturan aksesnya. Semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya.
4. Setiap pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggungjawab tugas dan kewenangannya.
5. Publik dapat mengakses informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

#### F. Sarana dan Prasarana

1. Sarana penyimpanan arsip konvensional berupa rak statis untuk arsip biasa, *filing cabinet* untuk arsip terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia. Untuk arsip elektronik juga perlu ditentukan kualitas dan tingkat keamanan *hardware* dan *software* yang diadakan.
2. Prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkatan klasifikasi informasi.

I. Sumber Daya Manusia

Pejabat Fungsional Arsiparis dan atau petugas pengolah arsip yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas. Pengelola arsip tersebut harus ditetapkan melalui surat keputusan yang dikeluarkan serendah-rendahnya oleh Pimpinan Tinggi Pratama.

## BAB II

### KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

#### A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis meliputi:

1. klasifikasi keamanan; dan
2. pengamanan fisik dan informasi arsip.

#### B. Klasifikasi Keamanan

Arsip dinamis merupakan rekaman informasi yang disimpan untuk digunakan. Kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan arsip berkaitan dengan hak dan kewenangan seseorang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan arsip menyangkut kewajiban suatu pihak untuk merahasiakan informasi tertentu kepada orang yang tidak berhak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan terhadap akses arsip dinamis. Berdasarkan ketentuan umum yang telah dibahas, arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Arsip berklasifikasi Biasa, arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang termasuk ke dalam kategori arsip umum merupakan arsip yang apabila dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan Negara.
2. Arsip berklasifikasi Terbatas, Arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas merupakan arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Arsip berklasifikasi Rahasia, arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang termasuk ke dalam kategori arsip Rahasia apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat

dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

Pengamanan arsip sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

| NO. | TINGKAT<br>KLASIFIKASI<br>KEAMANAN | MEDIA ARSIP                                                                    |                                                                            |                                              |                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                    | ARSIP KONVENSIONAL                                                             |                                                                            |                                              | ARSIP ELEKTRONIK                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                          |
|     |                                    | ARSIP                                                                          | PENGGUNA                                                                   | PRASARANA<br>DAN SARANA                      | ARSIP                                                                                                | PENGGUNA                                                                   | PRASARANA<br>DAN SARANA                                                                                                  |
| 1   | Biasa                              | Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus                                      | Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses | Tidak memerlukan prasarana dan sarana Khusus | <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip | Pengguna yang berasal dari Eksternal dan internal yang mempunyai hak akses | Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus                                                                             |
| 2   | Terbatas                           | Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap “TERBATAS” pada fisik arsip | Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan              | Diperlukan tempat penyimpanan yang aman      | 1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam                                 | 1. Autentikasi pengguna (nama penggun/<br><i>password</i> atau ID          | 1. Autentikasi <i>server</i><br>2. Langkah- langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus. |

| NO. | TINGKAT<br>KLASIFIKASI<br>KEAMANAN | MEDIA ARSIP        |                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                   |
|-----|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                    | ARSIP KONVENSIONAL |                                     |                         | ARSIP ELEKTRONIK                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                   |
|     |                                    | ARSIP              | PENGGUNA                            | PRASARANA<br>DAN SARANA | ARSIP                                                                                                                                                                                                                         | PENGGUNA                                                                        | PRASARANA<br>DAN SARANA                                                                           |
|     |                                    |                    | eksternal<br>serta penegak<br>hukum |                         | rangka<br>menjamin<br>autentisitas<br>arsip.<br>2. <i>File-file</i><br>elektronik<br>(termasuk <i>data</i><br><i>base</i> ) harus<br>di lindungi<br>terhadap<br>penggunaan<br>internal atau<br>oleh pihak-<br>pihak eksternal | digital).<br>2. Penggunaan<br>untuk <i>log in</i><br>pada tingkat<br>individual | 3. <i>Firewall</i> dan<br>sistem-sistem<br>serta prosedur<br>prosedur deteksi<br>terhadap intrusi |

| NO. | TINGKAT<br>KLASIFIKASI<br>KEAMANAN | MEDIA ARSIP                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                    | ARSIP KONVENSIONAL                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                               | ARSIP ELEKTRONIK                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
|     |                                    | ARSIP                                                                                                                                                                | PENGGUNA                                                                                           | PRASARANA<br>DAN SARANA                       | ARSIP                                                                                                                                                                                                                  | PENGGUNA                                                                                                                                                                      | PRASARANA<br>DAN SARANA                                                                                                                                      |
| 3   | Rahasia                            | <p>1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap “RAHASIA” pada fisik arsip.</p> <p>2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat</p> | <p>Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> | <p>Lokasi aman dengan akses yang terbatas</p> | <p>1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip.</p> <p>2. <i>File-file</i> elektronik (termasuk <i>data base</i>) harus dilindungi terhadap penggunaan</p> | <p>1. Hanya staf yang ditunjuk oleh Kepala BIG atau organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut.</p> <p>2. Autentikasi Pengguna (nama pengguna/</p> | <p>1. Langkah-langkah Keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus/aplikasi khusus</p> <p>2. <i>Firewall</i> serta sistem-sistem dan prosedur-prosedur</p> |

| NO. | TINGKAT<br>KLASIFIKASI<br>KEAMANAN | MEDIA ARSIP        |          |                         |                                                 |                                                                                                                 |                                  |
|-----|------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                                    | ARSIP KONVENSIONAL |          |                         | ARSIP ELEKTRONIK                                |                                                                                                                 |                                  |
|     |                                    | ARSIP              | PENGGUNA | PRASARANA<br>DAN SARANA | ARSIP                                           | PENGGUNA                                                                                                        | PRASARANA<br>DAN SARANA          |
|     |                                    | rahasia            |          |                         | internal atau<br>oleh pihak-<br>pihak eksternal | <i>password</i><br>atau ID<br>digital)<br>3. Penggunaan<br>untuk <i>log in</i><br>pada<br>tingkat<br>individual | deteksi<br>terhadap<br>intruksi. |

C. Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip

Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip dilaksanakan melalui:

1. Pengamanan Ruang Simpan Arsip

Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (*CCTV*), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip (arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada *filing cabinet*, dan arsip kategori rahasia di simpan pada lemari besi).

2. Penentuan Pengelola Arsip

Pengelola arsip yang dimaksud meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan dan di Unit Pengolah. Pengelola arsip inaktif sangat berperan dalam pengamanan arsip di *Records Centre* (Pusat Arsip) sehingga penetapan hak akses arsip dapat berjalan optimal. Arsiparis dan atau penata arsip aktif mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di unit pengolah.

3. Penciptaan Daftar Arsip Terbatas dan Arsip Rahasia

Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia termasuk kedalam pengamanan informasi arsip. Tujuannya sebagai acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan unit pengolah.

### BAB III

#### KLASIFIKASI AKSES ARSIP

Berdasarkan klasifikasi keamanan yang telah diatur di bab sebelumnya, dapat ditentukan hak akses bagi pengguna yang berhak untuk mengakses arsip dinamis. Pengguna yang diberikan hak akses, terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu pengguna yang ada di lingkungan internal instansi dan pengguna dari lingkungan eksternal instansi. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi.
  - a. Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya,
    - 2) Pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan level tertinggi), yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.
    - 3) Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan level tinggi), yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
  - b. Pelaksana Kebijakan, yaitu Pejabat Struktural, Arsiparis, dan Pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, dan rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level

menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

- c. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

2. Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal

- a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka.
- b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses mengaudit.
- c. Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, contohnya ketika pihak penegak hukum sedang menangani tindak pidana masalah korupsi.

BAB IV  
DAFTAR ARSIP BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN  
HAK AKSES ARSIP DINAMIS

I. FASILITATIF

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                                                  | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah         |
|----|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | KEU                                             | KEUANGAN    |                                                                                                                                  |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.00                                          |             | Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBN-P                                                                  | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Keuangan dan BMN |
|    | KEU.00.01                                       |             | Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara                                                                                               |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.00.02                                       |             | Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Komisi DPR-RI |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.00.03                                       |             | Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI                                                                                      |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.00.04                                       |             | Ketetapan Pagu Definitif                                                                                                         |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.00.05                                       |             | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)                                                                                                 |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.00.06                                       |             | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Termasuk Revisinya                             |                         |           |                                                                                                |                       |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                                                                                          | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah         |
|----|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | KEU.01                                          |             | Pelaksanaan Anggaran                                                                                                                                                     | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Keuangan dan BMN |
|    | KEU.01.01                                       |             | Ketentuan/Peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.01.02                                       |             | Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari Masing-masing Satker                                                                                                            |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.01.03                                       |             | Laporan Pelaksanaan Anggaran                                                                                                                                             |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.02                                          |             | Belanja                                                                                                                                                                  |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.02.01                                       |             | Surat Penyedia Dana (SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GU)                                                                                                                            | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Keuangan dan BMN |
|    | KEU.02.02                                       |             | Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.02.03                                       |             | Pembukuan Anggaran                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.02.04                                       |             | Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal                                                                   |                         |           |                                                                                                |                       |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                         | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah         |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | KEU.03                                          |             | Bantuan / Pinjaman Luar Negeri                                          | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Keuangan dan BMN |
|    | KEU.03.01                                       |             | Permohonan Pinjaman Luar Negeri ( <i>Blue Book</i> )                    |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.03.02                                       |             | Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai ( <i>Grey Book</i> )   |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.03.03                                       |             | Dokumen <i>Memorandum Of Understanding</i> (MoU) dan Dokumen Sejenisnya |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.03.04                                       |             | Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN)                                    |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.03.05                                       |             | Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri                        |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.03.06                                       |             | Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN)                       |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.03.07                                       |             | Otorisasi Penarikan Dana ( <i>Payment Advice</i> )                      |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.03.08                                       |             | Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri                            |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.03.09                                       |             | Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor (Replenishment)             |                         |           |                                                                                                |                       |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                                                       | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah         |
|----|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | KEU.03.10                                       |             | Laporan Kemajuan, Bulanan, dan Triwulan ( <i>Report Progress, Monthly, dan Quarterly</i> )                                            |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.03.11                                       |             | Laporan Penyelesaian/Laporan Tahunan ( <i>Completion Report/Annual Report</i> )                                                       |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.03.12                                       |             | Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi               |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.04                                          |             | Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman / Hibah Luar Negeri                                                                                    | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Keuangan dan BMN |
|    | KEU.04.01                                       |             | Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan    |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.04.02                                       |             | Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang/Jasa termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan |                         |           |                                                                                                |                       |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                                                                                                                                                     | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan | Unit Pengolah |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
|    | KEU.04.03                                       |             | Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan.                                                                                        |                         |           |                       |               |
|    | KEU.04.04                                       |             | Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Pengelola Barang termasuk Berita Acara Serah Terima Barang                                                                                                          |                         |           |                       |               |
|    | KEU.04.05                                       |             | Keputusan Penetapan Pengelola Keuangan Kementerian/ Unit Kerja                                                                                                                                                                      |                         |           |                       |               |
|    | KEU.04.06                                       |             | Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Bendahara Pembantu termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan |                         |           |                       |               |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                                                                                                                                                 | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah         |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | KEU.05                                          | Sistem Akuntansi Instansi (SAI)                                                                                                                                                             | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Keuangan dan BMN |
|    | KEU.05.01                                       | Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)                                                                                                                                                             |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.05.02                                       | Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Perintah Membayar (SPM) |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.05.03                                       | Laporan Realisasi Bulanan SAI/Triwulan/ Semester                                                                                                                                            |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.06                                          | Pertanggungjawaban Keuangan Negara                                                                                                                                                          | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Keuangan dan BMN |
|    | KEU.06.01                                       | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia                                                                                            |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.06.02                                       | Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat Jenderal                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.06.03                                       | Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.06.04                                       | Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara                                                                                                                                               |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.06.05                                       | Gagal Bayar                                                                                                                                                                                 |                         |           |                                                                                                |                       |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                             | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah         |
|----|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | KEU.07                                          |             | Akuntansi dan Pelaporan                                                                     | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Keuangan dan BMN |
|    | KEU.07.01                                       |             | Verifikasi dan Pembukuan Keuangan                                                           |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.07.02                                       |             | Akutansi dan pelaporan keuangan (triwulan, semester, dan Tahunan)                           |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.08                                          |             | Perbendaharaan dan penatausahaan keuangan                                                   | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Keuangan dan BMN |
|    | KEU.08.01                                       |             | Daftar Gaji, Lembur dan Uang Makan                                                          |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.08.02                                       |             | Kartu Gaji                                                                                  |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.08.03                                       |             | Surat Setoran Pajak (SSP)                                                                   |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.08.04                                       |             | Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)                                                            |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.08.05                                       |             | Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.08.06                                       |             | Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank                                                   |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.08.07                                       |             | Laporan Kas                                                                                 |                         |           |                                                                                                |                       |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                         | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah         |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | KEU.09                                          | Barang Milik Negara (BMN)                           | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Keuangan dan BMN |
|    | KEU.09.01                                       | Rencana Kebutuhan BMN                               |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.09.02                                       | Inventarisasi BMN                                   |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.09.03                                       | Pengelolaan BMN                                     |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.09.04                                       | Penghapusan/hibah BMN                               |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.09.05                                       | Berita Acara Serah Terima BMN                       |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.09.06                                       | Laporan BMN                                         |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.09.07                                       | Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi BMN |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.09.08                                       | Surat Teguran Kelalaian Pemanfaatan BMN             |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.10                                          | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Keuangan dan BMN |
|    | KEU.10.01                                       | Usulan Tarif PNBP                                   |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.10.02                                       | Kontrak/Perjanjian Sewa PNBP                        |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.10.03                                       | Penagihan/Pengembalian PNBP                         |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.10.04                                       | Prosedur Pengelolaan dan Pelaporan PNBP             |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.10.05                                       | Keringanan/Keberatan Pembayaran PNBP                |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.10.06                                       | Pemeriksaan dan Pengawasan PNBP                     |                         |           |                                                                                                |                       |
|    | KEU.10.07                                       | Sanksi/Denda PNBP                                   |                         |           |                                                                                                |                       |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                                                                          | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                    | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2  | KPG                                             | KEPEGAWAIAN                                                                                                          |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.00                                          | Formasi Pegawai                                                                                                      | Biasa                   | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |
|    | KPG.00.01                                       | Usulan dari Unit Kerja                                                                                               |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.00.02                                       | Usulan Permintaan Formasi kepada MenPan RB dan Kepala BKN                                                            |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.00.03                                       | Persetujuan MenPan dan RB                                                                                            |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.00.04                                       | Penetapan Formasi PNS                                                                                                |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.00.05                                       | Penetapan Formasi Khusus                                                                                             |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.01                                          | Penerimaan/Pengadaan Pegawai Negeri                                                                                  | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |
|    | KPG.01.01                                       | Proses Penerimaan Pegawai                                                                                            |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.01.02                                       | Penetapan Pengumuman Kelulusan                                                                                       |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.01.03                                       | Berkas Lamaran yang Tidak Diterima                                                                                   |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.01.04                                       | Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP                                                                              |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.01.05                                       | Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih dari 2 (dua) Tahun |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.01.06                                       | Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif                                                                                    |                         |           |                                                                                          |                                 |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                             | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                    | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | KPG.02                                          |             | Pembinaan Karir Pegawai                                                     | Biasa                   | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |
|    | KPG.02.01                                       |             | Diklat/ Kursus/ Tugas Belajar/ Ujian Dinas/ Izin Belajar Pegawai            |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.02.02                                       |             | Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/ Sertifikat              |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.02.03                                       |             | Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/ Standar Kinerja Pegawai (SKP) |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.02.04                                       |             | Daftar Usul Penetapan Angka Kredit                                          |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.02.05                                       |             | Berkas Disiplin Pegawai                                                     |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.02.06                                       |             | Penghargaan dan Tanda Jasa                                                  |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.02.07                                       |             | Satyalencana Karya Satya                                                    |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.02.08                                       |             | Pengembangan karir                                                          |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.03                                          |             | Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai                                  | Biasa                   | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                                                                                                                       | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                    | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | KPG.04                                          |             | Mutasi Pegawai                                                                                                                                                                                        | Biasa                   | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |
|    | KPG.04.01                                       |             | Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar-Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar-Unit |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.04.02                                       |             | Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN                                                                                                                                                              |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.04.03                                       |             | Mutasi Keluarga                                                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.04.04                                       |             | Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan                                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.04.05                                       |             | Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Fungsional (umum dan tertentu)                                                                                                       |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.04.06                                       |             | Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/ Kedudukan Hukum Pegawai                                                                                                                                   |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.04.07                                       |             | Peninjauan Masa Kerja                                                                                                                                                                                 |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.04.08                                       |             | Berkas Baperjakat                                                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.04.09                                       |             | Pelantikan Jabatan                                                                                                                                                                                    |                         |           |                                                                                          |                                 |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                                                       | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                    | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | KPG.05                                          |             | Administrasi Pegawai                                                                                                                  | Biasa                   | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |
|    | KPG.05.01                                       |             | Surat Perintah Dinas/Surat Tugas                                                                                                      |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.05.02                                       |             | Cuti Besar                                                                                                                            |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.05.03                                       |             | Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan                                                                                               |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.05.04                                       |             | Cuti Alasan Penting                                                                                                                   |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.05.05                                       |             | Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)                                                                                                 |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.05.06                                       |             | Dokumentasi Identitas Pegawai                                                                                                         |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.05.07                                       |             | Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kependidikan (DUK)                                                                                 |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.05.08                                       |             | Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala                                                                                               |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.05.09                                       |             | Berkas Pengurusan Tunjangan Jabatan                                                                                                   |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.05.10                                       |             | Berkas Pengurusan Tunjangan Kinerja                                                                                                   |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.05.11                                       |             | Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                          |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.05.12                                       |             | Keterangan Kerja                                                                                                                      |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.05.13                                       |             | Data Pegawai                                                                                                                          |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.05.12                                       |             | Pernyataan tidak sedang menjalani proses atau pernah pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap |                         |           |                                                                                          |                                 |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                 | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                    | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | KPG.06                                          |             | Kesejahteraan Pegawai                                                                           | Biasa                   | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |
|    | KPG.06.01                                       |             | Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai                                           |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.06.02                                       |             | Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BPJS                                                    |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.06.03                                       |             | Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan                                                       |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.06.04                                       |             | Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial                                                           |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.06.05                                       |             | Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas                                                            |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.06.06                                       |             | Berkas tentang Layanan Pegawai yang Meninggal karena Dinas                                      |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.06.07                                       |             | Berkas tentang Pemberian Tali Kasih                                                             |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.06.08                                       |             | Berkas tentang Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa                                             |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.06.09                                       |             | Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi                                                    |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.06.10                                       |             | Berkas tentang Perayaan Hari Besar Nasional/Keagamaan                                           |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.06.11                                       |             | Berkas tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) |                         |           |                                                                                          |                                 |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                                                        | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                            | Unit Pengolah                      |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | KPG.07                                          | Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak<br>Pensiun                                                         | Biasa                   | Eselon II | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Biro Kepegawaian<br>dan Organisasi |
|    | KPG.08                                          | Perselisihan/Sengketa Pegawai                                                                      | Biasa                   | Eselon II | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Biro Kepegawaian<br>dan Organisasi |
|    | KPG.09                                          | Usul Pemberhentian Dan Penetapan<br>Pensiun Pegawai/<br>Jandanya/Dudanya dan PNS Yang<br>Meninggal | Biasa                   | Eselon II | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Biro Kepegawaian<br>dan Organisasi |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                              | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                 | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | KPG.10                                          |             | Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil                                                                     | Rahasia                 | Eselon II | Privasi pegawai di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |
|    | KPG.10.01                                       |             | Berkas Lamaran yang Diterima                                                                                 |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.02                                       |             | Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya                                                                        |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.03                                       |             | Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN                                                                    |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.04                                       |             | S.K. Pengangkatan CPNS                                                                                       |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.05                                       |             | Hasil Pengujian Kesehatan                                                                                    |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.06                                       |             | S.K. Pengangkatan PNS                                                                                        |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.07                                       |             | S.K. Peninjauan Masa Kerja                                                                                   |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.08                                       |             | S.K. Kenaikan Pangkat                                                                                        |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.09                                       |             | Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan                            |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.10                                       |             | S.K.Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Fungsional (umum dan tertentu) |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.11                                       |             | S.K.Perpindahan Wilayah Kerja                                                                                |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.12                                       |             | S.K. Perpindahan antar-Instansi                                                                              |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.13                                       |             | S.K. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)                                                                   |                         |           |                                                                       |                                 |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                            | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan | Unit Pengolah |
|----|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
|    | KPG.10.14                                       |             | Berita Acara Pemeriksaan                                                   |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.15                                       |             | S.K.Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS                                   |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.16                                       |             | S.K.Perbantuan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk                         |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.17                                       |             | S.K.Penarikan Kembali dari Perbantuan/ Dipekerjakan                        |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.18                                       |             | S.K.Pemberian Uang Tunggu                                                  |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.19                                       |             | S.K.Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.20                                       |             | SK. Pengalihan PNS                                                         |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.21                                       |             | S.K.Pemberhentian sebagai PNS                                              |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.22                                       |             | S.K.Pemberhentian Sementara                                                |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.23                                       |             | Surat Keterangan Pernyataan Hilang                                         |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.24                                       |             | Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang                     |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.25                                       |             | S.K.Penggantian Nama                                                       |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.26                                       |             | Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran                                    |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.27                                       |             | Akta Nikah/Cerai                                                           |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.28                                       |             | Akta Kelahiran                                                             |                         |           |                       |               |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                          | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan | Unit Pengolah |
|----|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
|    | KPG.10.29                                       |             | Isian Formulir PUPNS                                     |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.30                                       |             | Berita Acara Pengambilan<br>Sumpah/Janji PNS dan Jabatan |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.31                                       |             | Surat Permohonan Menjadi<br>Anggota Partai Politik       |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.32                                       |             | Surat Keterangan Mutasi Keluarga                         |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.33                                       |             | Surat Keterangan Meninggal<br>Dunia/Hilang               |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.34                                       |             | Surat Keterangan Peningkatan<br>Pendidikan               |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.35                                       |             | Penetapan Angka Kredit Jabatan<br>Fungsional             |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.36                                       |             | Surat Keterangan Hasil Penelitian<br>Khusus              |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.37                                       |             | Surat Pemberitahuan Kenaikan<br>Gaji Berkala             |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.38                                       |             | Surat Tugas/Izin Belajar<br>Dalam/Luar Negeri            |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.39                                       |             | Surat Izin Berpergian ke Luar<br>Negeri                  |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.40                                       |             | Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf)<br>PNS                  |                         |           |                       |               |
|    | KPG.10.41                                       |             | Ijasah/Sertifikat                                        |                         |           |                       |               |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                             | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                 | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | KPG.10.42                                       |             | S.K.Penempatan/Penarikan Pegawai                                                                            |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.43                                       |             | S.K.Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk                                                        |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.44                                       |             | Surat Pertimbangan Status PNS                                                                               |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.45                                       |             | S.K.Pengaktifan Kembali Sebagai PNS                                                                         |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.46                                       |             | Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.47                                       |             | S.K. Pensiun                                                                                                |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.10.48                                       |             | Surat Pernyataan Bebas Hutang Piutang                                                                       |                         |           |                                                                       |                                 |
|    | KPG.11                                          |             | Berkas Perseorangan Pejabat Negara                                                                          | Rahasia                 | Eselon II | Privasi pegawai di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                         | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                    | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | KPG.12                                          |             | Pegawai Kontrak                         | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |
|    | KPG.12.01                                       |             | Proses penerimaan Pegawai Kontrak       |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.12.02                                       |             | Kontrak Pegawai Kontrak                 |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.12.03                                       |             | Berkas Perseorangan Pegawai Kontrak     |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.12.04                                       |             | Pemberhentian Pegawai Kontrak           |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.12.05                                       |             | Pengalaman Kerja                        |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | KPG.13                                          |             | Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi |                         |           |                                                                                          | Biro Kepegawaian dan Organisasi |
|    | KPG.13.01                                       |             | Proses Penerimaan                       | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi |                                 |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                               | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                                  | Unit Pengolah                     |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | KPG.13.02                                       |             | Berkas Perseorangan Seleksi<br>Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi                | Rahasia                 | Eselon II | Privasi<br>pegawai di<br>lingkungan<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi                                |                                   |
| 3  | PRC                                             | PERENCANAAN |                                                                               |                         |           |                                                                                                                        |                                   |
|    | PRC.00                                          |             | Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi<br>Pembangunan                             | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Biro Perencanaan<br>dan Kerjasama |
|    | PRC.00.01                                       |             | Rencana Pembangunan Jangka<br>Panjang/ master plan                            |                         |           |                                                                                                                        |                                   |
|    | PRC.00.02                                       |             | Rencana Pembangunan Jangka<br>Menengah (RPJM)/ Rencana<br>Strategis (Renstra) |                         |           |                                                                                                                        |                                   |
|    | PRC.00.03                                       |             | Penyelenggaraan Musyawarah<br>Perencanaan Pembangunan<br>Nasional             |                         |           |                                                                                                                        |                                   |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                          | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                  |
|----|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | PRC.01                                          |             | Program Kerja Tahunan                    | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Perencanaan dan Kerjasama |
|    | PRC.01.01                                       |             | Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung |                         |           |                                                                                                |                                |
|    | PRC.01.02                                       |             | Program Kerja Tahunan Unit Kerja         |                         |           |                                                                                                |                                |
|    | PRC.01.03                                       |             | Program Kerja Tahunan Lembaga/Instansi   |                         |           |                                                                                                |                                |
|    | PRC.02                                          |             | Penetapan/Kontrak Kinerja                | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Perencanaan dan Kerjasama |
|    | PRC.02.01                                       |             | Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi      |                         |           |                                                                                                |                                |
|    | PRC.02.02                                       |             | Pimpinan Unit Kerja                      |                         |           |                                                                                                |                                |
|    | PRC.03                                          |             | Laporan                                  | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Perencanaan dan Kerjasama |
|    | PRC.03.01                                       |             | Laporan Berkala                          |                         |           |                                                                                                |                                |
|    | PRC.03.02                                       |             | LAKIP                                    |                         |           |                                                                                                |                                |
|    | PRC.03.03                                       |             | Laporan Insidental                       |                         |           |                                                                                                |                                |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                          | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                  |
|----|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | PRC.04                                          |             | Evaluasi Program                                         | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Perencanaan dan Kerjasama |
|    | PRC.04.01                                       |             | Evaluasi Program Unit Kerja                              |                         |           |                                                                                                |                                |
|    | PRC.04.02                                       |             | Evaluasi Program Kementerian                             |                         |           |                                                                                                |                                |
| 4  | HKM                                             | HUKUM       |                                                          |                         |           |                                                                                                |                                |
|    | HKM.00                                          |             | Program Legislasi                                        | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Hukum                     |
|    | HKM.00.01                                       |             | Bahan/Materi Program Legislasi Nasional dari Kementerian |                         |           |                                                                                                |                                |
|    | HKM.00.02                                       |             | Program Legislasi Kementerian                            |                         |           |                                                                                                |                                |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                           | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah |
|----|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | HKM.01                                          |             | Rancangan Peraturan Perundang-undangan                                    | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi       | Biro Hukum    |
|    | HKM.01.01                                       |             | Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HKM.01.02                                       |             | Rancangan Peraturan Pemerintah                                            |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HKM.01.03                                       |             | Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden                          |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HKM.02                                          |             | Peraturan Menteri                                                         | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Hukum    |
|    | HKM.03                                          |             | Keputusan                                                                 | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Hukum    |
|    | HKM.03.01                                       |             | Keputusan Menteri                                                         |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HKM.03.02                                       |             | Keputusan Pejabat Setingkat Eselon I                                      |                         |           |                                                                                                |               |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                         | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah |
|----|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | HKM.04                                          |             | Instruksi                                               | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Hukum    |
|    | HKM.04.01                                       |             | Instruksi Menteri                                       |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HKM.04.02                                       |             | Instruksi Pejabat Setingkat Eselon I                    |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HKM.05                                          |             | Surat Perintah                                          | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Hukum    |
|    | HKM.05.01                                       |             | Surat Perintah Menteri                                  |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HKM.05.02                                       |             | Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon I dan Eselon II |                         |           |                                                                                                |               |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                                              | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                                  | Unit Pengolah |
|----|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | HKM.06                                          |             | Standar/Pedoman/Prosedur<br>Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/<br>Petunjuk Teknis yang Bersifat<br>Nasional/Regional/ Internasional | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Biro Hukum    |
|    | HKM.07                                          |             | Nota Kesepahaman (MoU)/<br>Kontrak/Perjanjian Kerja Sama                                                                     | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Biro Hukum    |
|    | HKM.07.01                                       |             | Dalam Negeri                                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                        |               |
|    | HKM.07.02                                       |             | Luar Negeri                                                                                                                  |                         |           |                                                                                                                        |               |
|    | HKM.08                                          |             | Dokumentasi Hukum                                                                                                            | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Biro Hukum    |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                 | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah |
|----|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | HKM.09                                          |             | Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum                                          | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Hukum    |
|    | HKM.09.01                                       |             | Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/Pembinaan Hukum |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HKM.09.02                                       |             | Laporan Hasil Pelaksanaan                                                       |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HKM.10                                          |             | Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi                                               | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi       | Biro Hukum    |
|    | HKM.11                                          |             | Kasus/Sengketa Hukum                                                            | Rahasia                 | Eselon I  | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi       | Biro Hukum    |
|    | HKM.11.01                                       |             | Pidana                                                                          |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HKM.11.02                                       |             | Perdata                                                                         |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HKM.11.03                                       |             | Tata Usaha Negara                                                               |                         |           |                                                                                                |               |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah |
|----|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | HKM.12                                          |             | Perizinan                      | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Hukum    |
|    | HKM.13                                          |             | Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Hukum    |
|    | HKM.13.01                                       |             | Hak Cipta                      |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HKM.13.02                                       |             | Hak Paten                      |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HKM.13.03                                       |             | Hak Merk                       |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HKM.14                                          |             | Penghargaan Kelembagaan        | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Hukum    |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                 |                                                                                      | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | HKM.15                                          |                             | Permohonan Hak yang Ditolak                                                          | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Hukum                      |
|    | HKM.15.01                                       |                             | Materi Rancangan Produk Hukum dan Unit Kerja Operasional                             |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | HKM.15.02                                       |                             | Proses Pembahasan Materi Produk Hukum di Tingkat Biro                                |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | HKM.15.03                                       |                             | Proses Pembahasan Materi Tingkat antar-Departemen/ Lembaga (Lintas Sektor)           |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | HKM.16                                          |                             | Surat Edaran                                                                         | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Hukum                      |
|    | HKM.16.01                                       |                             | Surat Edaran Menteri                                                                 |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | HKM.16.02                                       |                             | Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon I dan Eselon II                                |                         |           |                                                                                                |                                 |
| 5  | OTL                                             | ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |                                                                                      |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | OTL.00                                          |                             | Struktur Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja                                         | Biro Kepegawaian dan Organisasi |
|    | OTL.00.01                                       |                             | Pembentukan                                                                          |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | OTL.00.02                                       |                             | Perubahan                                                                            |                         |           |                                                                                                |                                 |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                         | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                                  | Unit Pengolah                      |
|----|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | OTL.00.03                                       |             | Pembubaran                                              |                         |           | Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi                                                                       |                                    |
|    | OTL.01                                          |             | Uraian Jabatan dan Tata Kerja                           | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Biro Kepegawaian<br>dan Organisasi |
|    | OTL.02                                          |             | Standar Kompetensi Jabatan<br>Struktural dan Fungsional | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Biro Kepegawaian<br>dan Organisasi |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip           | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | OTL.03                                          | Evaluasi Kementerian  | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |
|    | OTL.04                                          | Analisa Jabatan       | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |
|    | OTL.05                                          | Ketatalaksanaan (SOP) | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                             | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | OTL.06                                          |             | Bisnis Proses               | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |
|    | OTL.07                                          |             | Reformasi Birokrasi         | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Kepegawaian dan Organisasi |
|    | OTL.07.01                                       |             | Agen Perubahan              |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | OTL.07.02                                       |             | Zona Integritas             |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | OTL.07.03                                       |             | Lembar Kerja Evaluasi (LKE) |                         |           |                                                                                                |                                 |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                                                                                   | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 6  | UMM                                             | UMUM        |                                                                                                                                                                   |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.00                                          |             | Kearsipan                                                                                                                                                         | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Umum dan Layanan Pengadaan |
|    | UMM.00.01                                       |             | Administrasi Persuratan                                                                                                                                           |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.00.02                                       |             | Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.00.03                                       |             | Persetujuan Jadwal Retensi Arsip                                                                                                                                  |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.00.04                                       |             | Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip) Naskah dinas yang berkaitan dengan layanan jasa kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.00.05                                       |             | Penyusutan Kearsipan                                                                                                                                              |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.00.06                                       |             | Pembinaan Kearsipan                                                                                                                                               |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.00.07                                       |             | Risalah/ Notulen Rapat                                                                                                                                            |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.00.08                                       |             | Audit Kearsipan Eksternal                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.00.09                                       |             | Audit Kearsipan Internal                                                                                                                                          |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.01                                          |             | Kerumahtanggaan                                                                                                                                                   | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan              | Biro Umum dan Layanan Pengadaan |
|    | UMM.01.01                                       |             | Pendistribusian                                                                                                                                                   |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.01.02                                       |             | Telekomunikasi                                                                                                                                                    |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.01.03                                       |             | Administrasi Penggunaan Fasilitas                                                                                                                                 |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.01.04                                       |             | Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi                                                                                                                    |                         |           |                                                                                                |                                 |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                            | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | UMM.01.05                                       |             | Pengurusan Kendaraan Dinas                                                 |                         |           | Transmigrasi                                                                                   |                                 |
|    | UMM.01.06                                       |             | Pemeliharaan Gedung dan Taman                                              |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.01.07                                       |             | Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, Televisi, Kabel, dan Komputer  |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.01.08                                       |             | Ketertiban dan Keamanan                                                    |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.01.09                                       |             | Administrasi Pengelolaan Parkir                                            |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.01.10                                       |             | Administrasi Pakaian Dinas Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.01.11                                       |             | Pelayanan Kesehatan                                                        | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Umum dan Layanan Pengadaan |
|    | UMM.02                                          |             | Keprotokolan                                                               | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian                             | Biro Umum dan Layanan Pengadaan |
|    | UMM.02.01                                       |             | Penyelenggaraan Acara Kedinasan                                            |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.02.02                                       |             | Buku Tamu                                                                  |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | UMM.02.03                                       |             | Agenda Kegiatan Pimpinan (Menteri, Wakil Menteri dan Eselon I)             |                         |           |                                                                                                |                                 |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                            | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                    | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | UMM.02.04                                       |             | Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri      |                         |           | Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi                                                        |                                 |
|    | UMM.02.05                                       |             | Kunjungan Dinas Eksternal/Audiensi         |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | UMM.02.06                                       |             | Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat          |                         |           |                                                                                          |                                 |
| 7  | PBJ                                             |             | PENGADAAN BARANG DAN JASA                  |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | PBJ.00                                          |             | Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan   | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Umum dan Layanan Pengadaan |
|    | PBJ.00.01                                       |             | Standarisasi Pengadaan                     |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | PBJ.00.02                                       |             | Rencana Umum Pengadaan                     |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | PBJ.00.03                                       |             | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan           |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | PBJ.00.04                                       |             | Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sanggah |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | PBJ.00.05                                       |             | Layanan Pengelolaan Pengadaan              |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | PBJ.00.06                                       |             | Pengadaan Barang                           |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | PBJ.00.07                                       |             | Pengadaan Konstruksi                       |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | PBJ.00.08                                       |             | Pengadaan Jasa Konsultasi                  |                         |           |                                                                                          |                                 |
|    | PBJ.00.09                                       |             | Pengadaan Jasa Lainnya                     |                         |           |                                                                                          |                                 |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                              | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | PBJ.01                                          |             | Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                          | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi       | Biro Umum dan Layanan Pengadaan |
|    | PBJ.01.01                                       |             | Pengadaan Secara Elektronik                                                  |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | PBJ.01.02                                       |             | Naskah dinas yang berkaitan dengan sistem monitoring dan evaluasi pengadaan. |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | PBJ.01.03                                       |             | Pengadaan Barang                                                             |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | PBJ.01.04                                       |             | Pengadaan Konstruksi                                                         |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | PBJ.01.05                                       |             | Pengadaan Jasa Konsultasi                                                    |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | PBJ.01.06                                       |             | Pengadaan Jasa Lainnya                                                       |                         |           |                                                                                                |                                 |
| 8  | HMS                                             | HUMAS       |                                                                              |                         |           |                                                                                                |                                 |
|    | HMS.00                                          |             | Dokumentasi/Liputan                                                          | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Humas                      |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                                         | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | HMS.01                                          |             | Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi Kelembagaan                                                            | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Humas    |
|    | HMS.01.01                                       |             | Kliping Koran                                                                                                           |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HMS.01.02                                       |             | Brosur/ <i>Leaflet</i> / poster/ Plakat                                                                                 |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HMS.01.03                                       |             | Pengumuman/Pemberitaan                                                                                                  |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HMS.01.04                                       |             | Pengaduan Masyarakat                                                                                                    |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HMS.02                                          |             | Hubungan antar-Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/ Instansi                                                            | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Humas    |
|    | HMS.02.01                                       |             | Hubungan antar-Lembaga Pemerintah                                                                                       |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HMS.02.02                                       |             | Hubungan Organisasi Sosial/ LSM                                                                                         |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HMS.02.03                                       |             | Hubungan dengan Perusahaan                                                                                              |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HMS.02.04                                       |             | Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ Sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapangan (PKL) |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HMS.02.05                                       |             | Forum Kehumasan                                                                                                         |                         |           |                                                                                                |               |
|    | HMS.02.06                                       |             | Hubungan Media Massa                                                                                                    |                         |           |                                                                                                |               |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                                                  | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | HMS.03                                          | Rapat Kerja/ Dengar Pendapat/<br><i>Hearing</i> DPR                                          | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Humas    |
|    | HMS.04                                          | Bahan/ Materi Pidato/ Sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet, DPRD, Muspida Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Humas    |
|    | HMS.05                                          | Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal                                                | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Humas    |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                            | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                                  | Unit Pengolah |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | HMS.06                                          | Pameran/ Sayembara/ Lomba,<br>Festival, Pembuatan Spanduk dan<br>Iklan | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Biro Humas    |
|    | HMS.07                                          | Penghargaan/ Tanda Kenang-<br>kenangan                                 | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Biro Humas    |
|    | HMS.08                                          | Ucapan Terima Kasih, Ucapan<br>Selamat, dan Bela Sungkawa              | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Biro Humas    |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                         | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah        |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | HMS.09                                          |             | Pidato/ Sambutan Pimpinan               | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Humas           |
|    | HMS.09.01                                       |             | Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi     |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | HMS.09.02                                       |             | Wakil Menteri                           |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | HMS.09.03                                       |             | Pejabat Pimpinan Tinggi Madya           |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | HMS.10                                          |             | Kepustakaan                             | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Biro Humas           |
|    | HMS.10.01                                       |             | Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka       |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | HMS.10.02                                       |             | Pengadaan dan Pengolahan Bahan          |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | HMS.10.03                                       |             | Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | HMS.10.04                                       |             | Preservasi Bahan Pustaka                |                         |           |                                                                                                |                      |
| 9  | PWS                                             | PENGAWASAN  |                                         |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | PWS.00                                          |             | Rencana Pengawasan                      | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspektorat Jenderal |
|    | PWS.00.01                                       |             | Rencana Strategis Pengawasan            |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | PWS.00.02                                       |             | Rencana Kerja Tahunan                   |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | PWS.00.03                                       |             | Rencana Kinerja Tahunan                 |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | PWS.00.04                                       |             | Penetapan Kinerja Tahunan               |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | PWS.00.05                                       |             | Rakor Pengawasan Tingkat Nasional       |                         |           |                                                                                                |                      |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                 | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah        |
|----|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | PWS.01                                          |             | Pedoman Kebijakan Pengawasan    | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspektorat Jenderal |
|    | PWS.02                                          |             | Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspektorat Jenderal |
|    | PWS.03                                          |             | Audit                           |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | PWS.03.01                                       |             | Audit Kinerja                   | Rahasia                 | Eselon I  | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi       | Inspektorat Jenderal |
|    | PWS.03.02                                       |             | Audit dengan tujuan tertentu    |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | PWS.03.03                                       |             | Audit investigasi               |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | PWS.03.04                                       |             | Audit Operasional               |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | PWS.03.05                                       |             | Monthly Audit                   |                         |           |                                                                                                |                      |
|    | PWS.03.06                                       |             | Audit Lainnya                   |                         |           |                                                                                                |                      |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                       | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                    | Unit Pengolah        |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | PWS.04                                          |             | Reviu                                                 |                         |           |                                                                                          |                      |
|    | PWS.04.01                                       |             | Reviu laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan | Rahasia                 | Eselon I  | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspetorat Jenderal  |
|    | PWS.04.02                                       |             | Reviu laporan kinerja                                 |                         |           |                                                                                          |                      |
|    | PWS.04.03                                       |             | Reviu RKA-KL                                          |                         |           |                                                                                          |                      |
|    | PWS.04.04                                       |             | reviu Revisi DIPA/ Anggaran                           |                         |           |                                                                                          |                      |
|    | PWS.04.05                                       |             | PIPK                                                  |                         |           |                                                                                          |                      |
|    | PWS.04.06                                       |             | RKBMN                                                 |                         |           |                                                                                          |                      |
|    | PWS.05                                          |             | Evaluasi                                              |                         |           |                                                                                          |                      |
|    | PWS.05.01                                       |             | SAKIP                                                 | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspektorat Jenderal |
|    | PWS.05.02                                       |             | PMPRB                                                 |                         |           |                                                                                          |                      |
|    | PWS.05.03                                       |             | SPIP                                                  |                         |           |                                                                                          |                      |
|    | PWS.05.04                                       |             | Evaluasi Lainnya.                                     |                         |           |                                                                                          |                      |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                    | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                           | Unit Pengolah        |
|----|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | PWS.06                                          |             | Pemantauan                                                         |                         |           |                                                                                 |                      |
|    | PWS.06.01                                       |             | Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekoemndasi Hasil Pengawasan         | Rahasia                 | Eselon I  | Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspektorat Jenderal |
|    | PWS.06.02                                       |             | Pementauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan                  |                         |           |                                                                                 |                      |
|    | PWS.06.03                                       |             | Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal  |                         |           |                                                                                 |                      |
|    | PWS.06.04                                       |             | Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal |                         |           |                                                                                 |                      |
|    | PWS.06.05                                       |             | Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Internal        |                         |           |                                                                                 |                      |
|    | PWS.06.06                                       |             | Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Eksternal       |                         |           |                                                                                 |                      |
|    | PWS.06.07                                       |             | WBS (Whistle Blowing System)                                       |                         |           |                                                                                 |                      |
|    | PWS.06.08                                       |             | Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                       |                         |           |                                                                                 |                      |
|    | PWS.06.09                                       |             | Tuntutan Perbendaharaan                                            |                         |           |                                                                                 |                      |
|    | PWS.06.10                                       |             | Pemantauan Lainnya                                                 |                         |           |                                                                                 |                      |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                            | Unit Pengolah           |
|----|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | PW.07                                           |             | Pelaksanaan Pengawasan                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                  |                         |
|    | PWS.07.01                                       |             | Laporan Hasil Audit (LHA),<br>Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),<br>Laporan Hasil Pemeriksaan<br>Operasional (LHPO), Laporan<br>Hasil Evaluasi (LHE), Laporan<br>Hasil Akuntan (LA), Laporan<br>Auditor Independen (LAI), yang<br>Memerlukan Tindak Lanjut (TL)          | Rahasia                 | Eselon I  | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Inspektorat<br>Jenderal |
|    | PWS.07.02                                       |             | Laporan Hasil Audit (LHA),<br>Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),<br>Laporan Hasil Pemeriksaan<br>Operasional (LHPO), Laporan<br>Hasil Evaluasi (LHE), Laporan<br>Hasil Akuntan (LA), Laporan<br>Auditor Independen (LAI), yang<br>Tidak Memerlukan Tindak Lanjut<br>(TL) |                         |           |                                                                                                                  |                         |
|    | PWS.07.03                                       |             | Laporan Hasil Audit Investigasi<br>(LHAI) yang Mengandung Unsur<br>Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan<br>Memerlukan Tindak Lanjut (TL)                                                                                                                                    | Rahasia                 | Eselon I  | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Inspektorat<br>Jenderal |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                                       | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                            | Unit Pengolah           |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | PWS.07.04                                       |             | Laporan Perkembangan<br>Penanganan Surat Pengaduan<br>Masyarakat                                                      | Rahasia                 | Eselon I  | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Inspektorat<br>Jenderal |
|    | PWS.07.05                                       |             | Laporan Pemutakhiran Data                                                                                             |                         |           |                                                                                                                  |                         |
|    | PWS.07.06                                       |             | Laporan Perkembangan Barang<br>Milik Negara                                                                           | Terbatas                | Eselon II | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Inspektorat<br>Jenderal |
|    | PWS.03.07                                       |             | Laporan Kegiatan Pendampingan<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>dan Review Kementerian Desa,<br>PDT, dan Transmigrasi | Rahasia                 | Eselon I  | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Inspektorat<br>Jenderal |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                    | Unit Pengolah        |
|----|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | PWS.07.08                                       |             | <i>Good Governance</i>         | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspektorat Jenderal |
|    | PWS.08                                          |             | Pengawasan Lainnya             | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspektorat Jenderal |
|    | PWS.09                                          |             | Penerapan Early Warning System | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspektorat Jenderal |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                     | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                    | Unit Pengolah        |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | PWS.10                                          |             | Penerapan Internal Audit<br>Capability Model (IACM) | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspektorat Jenderal |
|    | PWS.11                                          |             | Surat Keterangan/Pernyataan Bebas Temuan            | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspektorat Jenderal |
|    | PWS.12                                          |             | Temuan Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti  | Rahasia                 | Eselon I  | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspektorat Jenderal |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip       |                                                      | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah        |
|----|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | PWS.13                                          |                   | Penerapan Peta Risiko<br>Pengawasan/Manajemen Risiko | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi       | Inspektorat Jenderal |
|    | PWS.14                                          | Piagam Pengawasan |                                                      | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspektorat Jenderal |
|    | PWS.15                                          |                   | Pemeriksaan Khusus                                   | Rahasia                 | Eselon I  | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi       | Inspektorat Jenderal |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                             | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                    | Unit Pengolah        |
|----|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | PWS.16                                          |             | Kertas Kerja Pemeriksaaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus                                 | Rahasia                 | Eselon I  | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspektorat Jenderal |
|    | PWS.16.01                                       |             | Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Perlu Ditindaklanjuti       |                         |           |                                                                                          |                      |
|    | PWS.16.02                                       |             | Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Tidak Perlu Ditindaklanjuti |                         |           |                                                                                          |                      |
|    | PWS.17                                          |             | Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                          | Rahasia                 | Eselon I  | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Inspektorat Jenderal |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                                        | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                            | Unit Pengolah           |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | PWS.18                                          | Satuan Pengawasan Intern (SPI)/<br>Sistem Pengendalian Intern<br>Pemerintah (SPIP) | Terbatas                | Eselon II | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Inspektorat<br>Jenderal |
|    | PWS.19                                          | Pengendalian Intern Pelaporan<br>Keuangan (PIPK)                                   | Terbatas                | Eselon II | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Inspektorat<br>Jenderal |
|    | PWS.20                                          | Hasil Analisis Laporan dan Evaluasi<br>Pengawasan                                  | Rahasia                 | Eselon I  | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Inspektorat<br>Jenderal |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                        | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                            | Unit Pengolah           |
|----|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | PWS.21                                          |             | Laporan Harta Kekayaan<br>Penyelenggara Negara (LHKPN) | Terbatas                | Eselon II | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT,<br>dan<br>Transmigrasi | Inspektorat<br>Jenderal |

## II. SUBSTANTIF

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                                                  | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses  | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                               | Unit Pengolah                                               |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | BIJ                                             | KEBIJAKAN                                                                                    |                         |            |                                                                                                                     |                                                             |
|    | BIJ.00                                          | Penyiapan Bahan/Proses<br>Penyusunan Kebijakan                                               | Biasa                   | Eselon III | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Biro Hukum                                                  |
|    | BIJ.01                                          | Penetapan dalam Bentuk Pengaturan<br>berupa Norma, Standar, Prosedur,<br>dan Kriteria (NSPK) | Biasa                   | Eselon III | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Biro Hukum                                                  |
| 2  | PRI                                             | PROGRAM PRIORITAS                                                                            |                         |            |                                                                                                                     |                                                             |
|    | PRI.00                                          | Dana Desa                                                                                    | Terbatas                | Eselon II  | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja                                                        | Direktorat Jenderal<br>Pembangunan<br>Desa dan<br>Perdesaan |
|    | PRI.00.01                                       | Padat karya tunai desa                                                                       |                         |            |                                                                                                                     |                                                             |
|    | PRI.00.02                                       | Bantuan langsung tunai (BLT) dana<br>desa                                                    |                         |            |                                                                                                                     |                                                             |
|    | PRI.00.03                                       | Desa tanggap Covid-19                                                                        |                         |            |                                                                                                                     |                                                             |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                  | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                         | Unit Pengolah                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRI.01                                          | Pengembangan Produk Unggulan<br>Kawasan Perdesaan (Prukades) |                         |           | Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi                                                                 |                                                                                                                 |
|    | PRI.02                                          | Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)                              | Terbatas                | Eselon II | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Direktorat Jenderal<br>Pengembangan<br>Ekonomi dan<br>Investasi Desa,<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
|    | PRI.03                                          | Embung Desa                                                  | Terbatas                | Eselon II | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Direktorat Jenderal<br>Pembangunan<br>Desa dan<br>Perdesaan                                                     |
|    | PRI.04                                          | Sarana Olahraga Desa                                         |                         |           |                                                                                                               |                                                                                                                 |
|    | PRI.05                                          | SDGs Desa                                                    |                         |           |                                                                                                               |                                                                                                                 |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                    | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                                      |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3  | PDP                                             | PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN                                 |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.00                                          | Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan              | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan |
|    | PDP.00.01                                       | Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana            |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.00.02                                       | Perencanaan Teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan   |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.00.03                                       | Perencanaan Teknis Advokasi dan Kerja Sama                     |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.00.04                                       | Perencanaan Teknis Pemanfaatan dan Pengendalian Dana Desa      |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.01                                          | Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan            | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan |
|    | PDP.01.01                                       | Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Kawasan Permukiman |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.01.02                                       | Pembangunan Sarana dan Prasarana Konektivitas                  |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.01.03                                       | Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi dan Sosial Budaya     |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.01.04                                       | Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika    |                         |           |                                                                                                |                                                    |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                  | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                                      |
|----|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | PDP.02                                          |             | Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan                     | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan |
|    | PDP.02.01                                       |             | Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, dan Perlindungan Sosial |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.02.02                                       |             | Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Modal Sosial Budaya                        |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.02.03                                       |             | Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat                                         |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.02.04                                       |             | Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Kebencanaan                        |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.02.05                                       |             | Pengembangan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat                    |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.03                                          |             | Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan                                       | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan |
|    | PDP.03.01                                       |             | Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan                                    |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.03.02                                       |             | Fasilitasi Pendampingan                                                          |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.03.03                                       |             | Kerja sama Desa dan Perdesaan                                                    |                         |           |                                                                                                |                                                    |
|    | PDP.03.04                                       |             | Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan                                   |                         |           |                                                                                                |                                                    |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                                                    | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PDP.04                                          | Fasilitasi dan Pemanfaatan Dana Desa                                                           | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan                                               |
|    | PDP.04.01                                       | Penyusunan Rencana Prioritas Pemanfaatan dana Desa                                             |                         |           |                                                                                                |                                                                                                  |
|    | PDP.04.02                                       | Penyusunan Rencana Pemanfaatan Dana Desa secara Partisipatif                                   |                         |           |                                                                                                |                                                                                                  |
|    | PDP.04.03                                       | Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa                                                              |                         |           |                                                                                                |                                                                                                  |
|    | PDP.04.04                                       | Pengelolaan Sistem Informasi Dana Desa                                                         |                         |           |                                                                                                |                                                                                                  |
| 4  | PEI                                             | PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI                   |                         |           |                                                                                                |                                                                                                  |
|    | PEI.00                                          | Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi       | Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
|    | PEI.00.01                                       | Perencanaan Teknis Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi                              |                         |           |                                                                                                |                                                                                                  |
|    | PEI.00.02                                       | Perencanaan Teknis Pelayanan Investasi                                                         |                         |           |                                                                                                |                                                                                                  |
|    | PEI.00.03                                       | Perencanaan Teknis Pengembangan Produk Unggulan                                                |                         |           |                                                                                                |                                                                                                  |
|    | PEI.00.04                                       | Perencanaan Teknis Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan                                       |                         |           |                                                                                                |                                                                                                  |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                               | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                               | Unit Pengolah                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PEI.01                                          |             | Pengembangan Kelembagaan<br>Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah<br>Tertinggal dan Transmigrasi | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Direktorat Jenderal<br>Pengembangan<br>Ekonomi dan<br>Investasi Desa,<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
|    | PEI.01.01                                       |             | Pengembangan Badan Usaha Milik<br>Desa dan Badan Usaha Milik Desa<br>Bersama                  |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.01.02                                       |             | Pengembangan Badan Pengelola<br>Kawasan                                                       |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.01.03                                       |             | Pengembangan Kelembagaan<br>Ekonomi Masyarakat                                                |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.01.04                                       |             | Pengembangan Kelembagaan<br>Investasi                                                         |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.02                                          |             | Pelayanan Investasi Desa, Daerah<br>Tertinggal, dan Transmigrasi                              | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Direktorat Jenderal<br>Pengembangan<br>Ekonomi dan<br>Investasi Desa,<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
|    | PEI.02.01                                       |             | Pelayanan Informasi Potensi<br>Investasi                                                      |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.02.02                                       |             | Pelayanan Perijinan                                                                           |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.02.03                                       |             | Akses Permodalan                                                                              |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.02.04                                       |             | Pengembangan Kewirausahaan                                                                    |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                 | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                               | Unit Pengolah                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PEI.03                                          |             | Pengembangan Produk Unggulan<br>Desa, Daerah Tertinggal dan<br>Transmigrasi                     | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Direktorat Jenderal<br>Pengembangan<br>Ekonomi dan<br>Investasi Desa,<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
|    | PEI.03.01                                       |             | Pengembangan Produk Unggulan                                                                    |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.03.02                                       |             | Pengembangan Sarana dan<br>Prasarana Produksi, dan<br>Pengembangan Teknologi Produk<br>Unggulan |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.03.03                                       |             | Pengembangan Rantai Pasok dan<br>Rantai Nilai Produk Unggulan                                   |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.03.04                                       |             | Pengembangan Pembiayaan Produk<br>Unggulan                                                      |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.04                                          |             | Promosi dan Pemasaran Produk<br>Unggulan                                                        | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Direktorat Jenderal<br>Pengembangan<br>Ekonomi dan<br>Investasi Desa,<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
|    | PEI.04.01                                       |             | Pengembangan Strategi Pemasaran                                                                 |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.04.02                                       |             | Pengembangan Jaringan dan Kerja<br>Sama Pemasaran                                               |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.04.03                                       |             | Pengembangan Promosi Kawasan<br>dan Produk Unggulan                                             |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.04.04                                       |             | Pengembangan Pemasaran Produk<br>Unggulan                                                       |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|    | PEI.04.05                                       |             | Transformasi Ekonomi Kampung<br>Terpadu                                                         |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                                       | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                               | Unit Pengolah                                           |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 5  | PDT                                             | PERCEPATAN PEMBANGUNAN<br>DAERAH TERTINGGAL                                       |                         |           |                                                                                                                     |                                                         |
|    | PDT.00                                          | Penyerasian Rencana dan Program<br>Percepatan Pembangunan Daerah<br>Tertinggal    | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Direktorat Jenderal<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal |
|    | PDT.00.01                                       | Penyerasian Rencana dan Program<br>Pembangunan Sosial Budaya dan<br>Kelembagaan   |                         |           |                                                                                                                     |                                                         |
|    | PDT.00.02                                       | Penyerasian Rencana dan Program<br>Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana            |                         |           |                                                                                                                     |                                                         |
|    | PDT.00.03                                       | Penyerasian Rencana dan Program<br>Pemanfaatan Sumber Daya Alam<br>dan Lingkungan |                         |           |                                                                                                                     |                                                         |
|    | PDT.00.04                                       | Penyerasian Rencana dan Program<br>Pembangunan Daerah Khusus                      |                         |           |                                                                                                                     |                                                         |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                  | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                                     |
|----|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | PDT.01                                          |             | Penyerasian Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal                      | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal |
|    | PDT.01.01                                       |             | Penyerasian Pembangunan Modal Sosial Dan Kelembagaan                             |                         |           |                                                                                                |                                                   |
|    | PDT.01.02                                       |             | Penyerasian Pembangunan Modal Budaya                                             |                         |           |                                                                                                |                                                   |
|    | PDT.01.03                                       |             | Penyerasian Pembangunan Kesehatan, Gizi Keluarga dan Masyarakat                  |                         |           |                                                                                                |                                                   |
|    | PDT.01.04                                       |             | Penyerasian Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah                            |                         |           |                                                                                                |                                                   |
|    | PDT.02                                          |             | Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana                                     | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal |
|    | PDT.02.01                                       |             | Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Energi dan Air         |                         |           |                                                                                                |                                                   |
|    | PDT.02.02                                       |             | Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya dan Kelembagaan       |                         |           |                                                                                                |                                                   |
|    | PDT.02.03                                       |             | Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika          |                         |           |                                                                                                |                                                   |
|    | PDT.02.04                                       |             | Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman, dan Sanitasi Lingkungan |                         |           |                                                                                                |                                                   |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                 | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                               | Unit Pengolah                                           |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    | PDT.03                                          |             | Penyerasian Pemanfaatan Sumber<br>Daya Alam dan Lingkungan      | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Direktorat Jenderal<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal |
|    | PDT.03.01                                       |             | Penyerasian Pemanfaatan Sumber<br>Daya Alam Terbarukan          |                         |           |                                                                                                                     |                                                         |
|    | PDT.03.02                                       |             | Penyerasian Pemanfaatan Sumber<br>Daya Alam Non Terbarukan      |                         |           |                                                                                                                     |                                                         |
|    | PDT.03.03                                       |             | Penyerasian Pengelolaan<br>Kebencanaan                          |                         |           |                                                                                                                     |                                                         |
|    | PDT.03.04                                       |             | Penyerasian Adaptasi Iklim dan<br>Pengelolaan Lingkungan        |                         |           |                                                                                                                     |                                                         |
|    | PDT.04                                          |             | Penyerasian Pembangunan Daerah<br>Khusus                        | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Direktorat Jenderal<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal |
|    | PDT.04.01                                       |             | Penyerasian Pembangunan<br>Kawasan Perbatasan                   |                         |           |                                                                                                                     |                                                         |
|    | PDT.04.02                                       |             | Penyerasian Pembangunan Pulau-<br>Pulau Kecil dan Pulau Terluar |                         |           |                                                                                                                     |                                                         |
|    | PDT.04.03                                       |             | Penyerasian Pembangunan<br>Kawasan Strategis                    |                         |           |                                                                                                                     |                                                         |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                                                                     | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                               | Unit Pengolah                                                                    |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | PKT                                             | PEMBANGUNAN DAN<br>PENGEMBANGAN KAWASAN<br>TRANSMIGRASI                                                         |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                  |
|    | PKT.00                                          | Perencanaan Perwujudan Kawasan<br>Transmigrasi                                                                  |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                  |
|    | PKT.00.01                                       | Penyusunan Rencana Rinci Satuan<br>Kawasan Pengembangan Kawasan<br>dan Rencana Detail Kawasan<br>Perkotaan Baru | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Direktorat Jenderal<br>Pembangunan dan<br>Pengembangan<br>Kawasan<br>Transigrasi |
|    | PKT.00.02                                       | Legalisasi Tanah                                                                                                | Terbatas                | Eselon II | Memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi       | Direktorat Jenderal<br>Pembangunan dan<br>Pengembangan<br>Kawasan<br>Transigrasi |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                  | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                                                        |
|----|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | PKT.00.03                                       |             | Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Rencana Teknis Pusat Satuan Kawasan Pengembangan | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi       | Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transigrasi |
|    | PKT.00.04                                       |             | Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi                       | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transigrasi |
|    | PKT.01                                          |             | Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                 | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transigrasi |
|    | PKT.01.01                                       |             | Pembangunan Satuan Permukiman                                                                    |                         |           |                                                                                                |                                                                      |
|    | PKT.01.02                                       |             | Pembangunan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan                                                    |                         |           |                                                                                                |                                                                      |
|    | PKT.01.03                                       |             | Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru                                                               |                         |           |                                                                                                |                                                                      |
|    | PKT.01.04                                       |             | Evaluasi Kelayakan Permukiman dan Perwujudan Ruang                                               |                         |           |                                                                                                |                                                                      |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                                         | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                               | Unit Pengolah                                                                    |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | PKT.02                                          | Fasilitasi Penataan Persebaran<br>Penduduk di Kawasan Transmigrasi                  | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Direktorat Jenderal<br>Pembangunan dan<br>Pengembangan<br>Kawasan<br>Transigrasi |
|    | PKT.02.01                                       | Penyiapan Calon Transmigran                                                         |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                  |
|    | PKT.02.02                                       | Mediasi Kerja Sama Antar Daerah<br>dan Persiapan Perpindahan<br>Transmigrasi        |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                  |
|    | PKT.02.03                                       | Perpindahan dan Penempatan<br>Transmigran                                           |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                  |
|    | PKT.02.04                                       | Penataan Penduduk Setempat                                                          |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                  |
|    | PKT.02.05                                       | Konsolidasi dan Adaptasi<br>Lingkungan                                              |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                  |
|    | PKT.03                                          | Pengembangan Satuan Permukiman<br>dan Pusat Satuan Kawasan<br>Pengembangan          | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Direktorat Jenderal<br>Pembangunan dan<br>Pengembangan<br>Kawasan<br>Transigrasi |
|    | PKT.03.01                                       | Pengembangan Sosial Budaya dan<br>Mental Spiritual                                  |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                  |
|    | PKT.03.02                                       | Pengembangan Usaha dan<br>Kelembagaan                                               |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                  |
|    | PKT.03.03                                       | Pengembangan Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas Umum serta<br>Pengelolaan Lingkungan |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                  |
|    | PKT.03.04                                       | Fasilitasi Pengurusan Hak Atas<br>Tanah                                             |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                  |
|    | PKT.03.05                                       | Advokasi Pertanahan                                                                 |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                  |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                                                          | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                                                              |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | PKT.04                                          | Pengembangan Kawasan Transmigrasi                                                                    | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transigrasi       |
|    | PKT.04.01                                       | Pengembangan Masyarakat                                                                              |                         |           |                                                                                                |                                                                            |
|    | PKT.04.02                                       | Pengembangan Konektivitas                                                                            |                         |           |                                                                                                |                                                                            |
|    | PKT.04.03                                       | Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan                                                        |                         |           |                                                                                                |                                                                            |
|    | PKT.04.04                                       | Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi                                                           |                         |           |                                                                                                |                                                                            |
|    | PKT.04.05                                       | Pengelolaan Aset Kawasan Transmigrasi                                                                |                         |           |                                                                                                |                                                                            |
| 7  | BPI                                             | BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI                           |                         |           |                                                                                                |                                                                            |
|    | BPI.00                                          | Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi                   | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
|    | BPI.00.01                                       | Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan                                                             |                         |           |                                                                                                |                                                                            |
|    | BPI.00.02                                       | Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |                         |           |                                                                                                |                                                                            |
|    | BPI.00.03                                       | Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal                                                   |                         |           |                                                                                                |                                                                            |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                                                                                   | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                               | Unit Pengolah                                                                          |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | BPI.00.04                                       |             | Kebijakan Pembangunan<br>Transmigrasi                                                                                             |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                        |
|    | BPI.01                                          |             | Pengembangan Daya Saing Desa,<br>Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi                                                              | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Badan<br>Pengembangan dan<br>Informasi Desa,<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
|    | BPI.01.01                                       |             | Pengembangan Kreativitas dan<br>Inovasi                                                                                           |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                        |
|    | BPI.01.02                                       |             | Pengembangan Teknologi Tepat<br>Guna                                                                                              |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                        |
|    | BPI.01.03                                       |             | Pengembangan Teknologi Tinggi                                                                                                     |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                        |
|    | BPI.01.04                                       |             | Pengembangan teknologi Digital                                                                                                    |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                        |
|    | BPI.02                                          |             | Pusat Penyusunan Keterpaduan<br>Rencana Pembangunan Desa, Daerah<br>Tertinggal, dan Transmigrasi                                  | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Badan<br>Pengembangan dan<br>Informasi Desa,<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
|    | BPI.02.01                                       |             | Penyusunan Keterpaduan Rencana<br>Pembangunan Desa dan Perdesaan                                                                  |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                        |
|    | BPI.02.02                                       |             | Penyusunan Keterpaduan Rencana<br>Pengembangan Ekonomi dan<br>Investasi Desa dan Perdesaan,<br>Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                        |
|    | BPI.02.03                                       |             | Penyusunan Keterpaduan Rencana<br>Percepatan Pembangunan Daerah<br>Tertinggal                                                     |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                        |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                                                            |                                                                               | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | BPI.02.04                                       |                                                                                                        | Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Transmigrasi                       |                         |           |                                                                                                |                                                                                                        |
|    | BPI.03                                          |                                                                                                        | Pusat Data dan Informasi Pembangunan desa, Daerah Tertinggal dan transmigrasi | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi                             |
|    | BPI.03.01                                       |                                                                                                        | Pengembangan Sistem Informasi                                                 |                         |           |                                                                                                |                                                                                                        |
|    | BPI.03.02                                       |                                                                                                        | Pengelolaan Teknologi Informasi                                               |                         |           |                                                                                                |                                                                                                        |
|    | BPI.03.03                                       |                                                                                                        | Pengelolaan Data dan Informasi                                                |                         |           |                                                                                                |                                                                                                        |
|    | BPI.03.04                                       |                                                                                                        | Pengembangan Kerja Sama Data dan Informasi                                    |                         |           |                                                                                                |                                                                                                        |
| 8  | SDM                                             | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI |                                                                               |                         |           |                                                                                                |                                                                                                        |
|    | SDM.00                                          |                                                                                                        | Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
|    | SDM.00.01                                       |                                                                                                        | Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat                                          |                         |           |                                                                                                |                                                                                                        |
|    | SDM.00.02                                       |                                                                                                        | Pengembangan Sistem dan Model Pemberdayaan Masyarakat                         |                         |           |                                                                                                |                                                                                                        |
|    | SDM.00.03                                       |                                                                                                        | Pengembangan Sistem Pelayanan Pendampingan Masyarakat                         |                         |           |                                                                                                |                                                                                                        |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                                              | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                                               | Unit Pengolah                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | SDM.01                                          |             | Pelatihan Sumber Daya Manusia<br>Desa, Daerah Tertinggal dan<br>Transmigrasi | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia dan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa,<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
|    | SDM.01.01                                       |             | Penyusunan Rencana dan Program<br>Pelatihan Sumber Daya Manusia              |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|    | SDM.01.02                                       |             | Pengembangan Kelembagaan dan<br>Tenaga Pelatihan                             |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|    | SDM.01.03                                       |             | Pengembangan Standarisasi dan<br>Sertifikasi Profesi                         |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|    | SDM.01.04                                       |             | Pengembangan Kerja Sama<br>Pelatihan                                         |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|    | SDM.02                                          |             | Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil<br>Negara                                   | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki<br>dampak yang<br>mengganggu<br>terhadap<br>kinerja<br>Kementerian<br>Desa, PDT, dan<br>Transmigrasi | Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia dan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa,<br>Daerah Tertinggal,<br>dan Transmigrasi |
|    | SDM.02.01                                       |             | Penyusunan Rencana dan Program<br>Pelatihan                                  |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|    | SDM.02.02                                       |             | Penyelenggaraan Pelaksanaan<br>Pelatihan                                     |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|    | SDM.02.03                                       |             | Pengembangan Kelembagaan dan<br>Tenaga Pelatih                               |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|    | SDM.02.04                                       |             | Pengembangan Kerja Sama<br>Pelatihan                                         |                         |           |                                                                                                                     |                                                                                                                          |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip                                                            | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan                                                                          | Unit Pengolah                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | SDM.03                                          | Pembinaan Jabatan Fungsional                                           |                         |           |                                                                                                |                                                                                                        |
|    | SDM.03.01                                       | Rencana dan Program Pengembangan Jabatan Fungsional                    | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
|    | SDM.03.02                                       | Pengembangan Standarisasi Kompetensi                                   |                         |           |                                                                                                |                                                                                                        |
|    | SDM.03.03                                       | Pengembangan Profesi, Sertifikasi Kelembagaan dan Jabatan Fungsional   |                         |           |                                                                                                |                                                                                                        |
|    | SDM.03.04                                       | Evaluasi dan Penilaian Jabatan Fungsional                              | Terbatas                | Eselon II | Memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi       | Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional                                                                     |
|    | SDM.04                                          | Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  | Biasa                   | Eselon IV | Tidak memiliki dampak yang mengganggu terhadap kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
|    | SDM.04.01                                       | Perencana dan Program Pengembangan fasilitasi dan pelatihan masyarakat |                         |           |                                                                                                |                                                                                                        |
|    | SDM.04.02                                       | Pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia  |                         |           |                                                                                                |                                                                                                        |

| No | Kode Arsip<br>(Primer,<br>Sekunder,<br>Tersier) | Jenis Arsip |                                                 | Klasifikasi<br>Keamanan | Hak Akses | Dasar<br>Pertimbangan | Unit Pengolah |
|----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
|    | SDM.04.03                                       |             | Pemantauan, evaluasi dan<br>pelaporan fasilitas |                         |           |                       |               |

BAB V  
PENUTUP

Demikian Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini disusun untuk dijadikan acuan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis dan digunakan sebagai dasar untuk melindungi informasi dari akses oleh pihak yang berhak.

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum**



**Teguh**